

Kegiatan Strategis Daerah 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
KSD20 Kegiatan Strategis Daerah 2020						
KSD20P39 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA						
KSD20P39RA989: Peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Selatan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 24,03Dasar penilaian perencanaan kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA20-B03: 1. Ditetapkannya Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 Tahun 2020 menggunakan data hasil input pada sistem e-SAKIPCatatan: target selesai pada bulan Januari2. Ditetapkannya rencana aksi Perjanjian Kinerja Eselon 2 Tahun 2020Catatan : target selesai pada bulan Maret	Menunggu Persetujuan
KSD20P39RA993: Peningkatan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP di Kota Administrasi Jakarta Selatan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Tersedianya hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah secara berkala	Tercapainya nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 20,03Dasar penilaian pengukuran kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25	TA20-B03: 1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 20192. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 TW IV Tahun 20193. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TW IV Tahun 2019	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Tercapainya nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 20,03Dasar penilaian pengukuran kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Tercapainya nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 20,03Dasar penilaian pengukuran kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan</p>	<p>TA20-B06:</p> <p>1. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-20222. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 20203. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 TW I Tahun 20204. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TW I Tahun 2020</p> <p>TA20-B09:</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 20202. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 TW II Tahun 20203. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TW II Tahun 2020</p>	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tercapainya nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 20,03Dasar penilaian pengukuran kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA20-B12: 1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 20202. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Eselon 2, 3 dan 4 TW III Tahun 20203. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TW III Tahun 2020	
KSD20P39RA997: Peningkatan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP di Kota Administrasi Jakarta Selatan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Tercapainya nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP sebesar 12,02Dasar penilaian pelaporan kinerja mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA20-B03: Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2019	Menunggu Persetujuan
KSD20P63 Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)						

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
KSD20P63RA1023: Proses Bisnis Walikota Jakarta Selatan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Tersusunnya Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menjadi prioritas tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah	Draf Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menjadi prioritas tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah	TA20-B12: Tersusunnya peta proses bisnis pada perangkat daerah	Menunggu Persetujuan
KSD20P66 Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan						
KSD20P66RA1005: Daftar usulan lokasi kawasan yang akan dilakukan penataan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Teridentifikasinya usulan nama dan deliniasi kawasan yang akan dilakukan penataan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Daftar usulan nama dan deliniasi kawasan yang akan ditata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	TA20-B03: Daftar usulan nama dan deliniasi kawasan yang akan ditata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang disetujui oleh Gubernur untuk dilakukan penataan	Menunggu Persetujuan
KSD20P66RA1006: Koordinasi dan pemantauan penyelesaian penyusunan rencana penataan kawasan (target 17 lokasi)	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terselesainya penyusunan muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sudin CKTRP dan Subanpeko sesuai dengan sesuai Rapergub Penguatan Peran Walikota/Bupati untuk Penataan Kawasan di Wilayah Kota/Kab. Adm	Muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan	TA20-B06: Tersusunnya muatan rencana1. Desain perancangan2. Matriks rencana kegiatan TA20-B09: (bulan Juli): Muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan yang selesai dan disepakati untuk dilaksanakan	Menunggu Persetujuan
KSD20P66RA1007: Koordinasi persetujuan muatan rencana penataan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1. Terlaksananya simulasi penataan kawasan Kota Adm. Jakarta Selatan	Persetujuan muatan rencana penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta	TA20-B09: (bulan Juli) Terlaksananya presentasi dan persetujuan	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
kawasan oleh Gubernur, PD, UKPD, Masyarakat serta stakeholder/ pemangku kepentingan terkait (target 17 lokasi)		DAERAH,DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	pada progres pekerjaan 90%2. Terlaksananya presentasi di depan Gubernur pada forum rapat pimpinan untuk mendapatkan persetujuan	Selatan untuk dilaksanakan	rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan di depan Asisten Pemerintahan dan Gubernur	
KSD20P66RA1008: Expose/sosialisasi/ public hearing untuk hasil rencana penataan kawasan yang telah mencapai progres 90% atau telah mendapatkan persetujuan Gubernur (target 17 lokasi)	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terlaksananya expose/sosialisasi/ public hearing di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Expose/sosialisasi/public hearing	TA20-B09: (bulan Juli): Terinformasikannya rencana penataan di Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PD, UKPD, masyarakat serta stakeholder/pemangku kepentingan lainnya	Menunggu Persetujuan
KSD20P66RA1010: Kalender pelaksanaan penataan kawasan TA 2020	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Tersusunnya kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2020 sesuai dengan DPA UKPD atau PD yang terkait	Kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2020	TA20-B06: (April): Berita Acara Kesepakatan tentang Kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2020 di Kota Adm. Jakarta Selatan antara Walikota dengan PD dan UKPD yang terkait	Menunggu Persetujuan
KSD20P66RA1011: Evaluasi verifikasi kinerja Kepala UKPD oleh Walikota/Bupati TA 2020	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Tersusunnya laporan verifikasi kinerja Kepala UKPD dalam implementasi penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Selatan	Laporan verifikasi kinerja Kepala UKPD dalam implementasi penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Selatan	TA20-B09: laporan verifikasi kinerja Kepala UKPD dalam implementasi penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Selatan TA20-B12: laporan verifikasi kinerja Kepala UKPD dalam implementasi penataan	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					kawasan di Kota Adm. Jakarta Selatan	
KSD20P9 Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun						
KSD20P9RA981: Pelaksanaan "Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun" tingkat Kota/Kabupaten termasuk Eksibisi Olahraga Disabilitas	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BIRO TATA PEMERIN TAHAN,DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terlaksananya "Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun" Tingkat Kota/Kabupaten Tahun 2020	Terlaksananya Festival Olahraga di tingkat Kota/Kabupaten	TA20-B12: Terlaksananya Festival Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten	Menunggu Persetujuan
KSD20P38 Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)						
KSD20P38RA987: Input data Aset Persediaan ke dalam Sistem Persediaan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BIRO ADMINISTRASI SETDA,BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,BADAN PENGELOLA ASET DAERAH,DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelaksanaan implementasi Sistem Persediaan	Terimplementasinya Sistem Persediaan di seluruh SKPD/UKPD selain Sekolah dan seluruh BLUD	TA20-B06: Input data aset persediaan dalam Sistem Persediaan oleh seluruh SKPD/UKPD selain Sekolah dan seluruh BLUD	Menunggu Persetujuan
KSD20P45 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat						
KSD20P45RA998: Persiapan dan Pengukuhan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana CIP Swakelola Tipe IV	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA,INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terlaksananya Persiapan dan Pengukuhan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana CIP Swakelola Tipe IV	Tersedianya pokmas yang sudah dikukuhkan dan siap untuk melaksanakan kegiatan CIP Swakelola Tipe IV sesuai ketentuan aturan perundang-undanganLaporan progres terbentuknya Pokmas oleh Walikota kepada Gubernur	TA20-B03: 01. - Terbentuknya pokmas di masing-masing Kelurahan hasil Konsultansi CAP 2019 (Januari 2020)02. -Pengecekan pemenuhan persyaratan pokmas; AD-ART, Struktur Organisasi, Sekretariat dan Ket Domisili - Pengukuhan Pokmas oleh Lurah (Februari 2020)	Menunggu Persetujuan
KSD20P45RA999: Pendampingan Tim dari UKPD di tingkat Walikota	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	Terbitnya SK Penetapan Tim Monitoring dari UKPD di tingkat Walikota	SK Penetapan Tim Monitoring dari UKPD di tingkat Walikota	TA20-B03: SK Penetapan Tim dari UKPD di tingkat Walikota	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
dan Bupati		PERMUKIMAN KOTA, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA			(Februari 2020)	
KSD20P73 Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian						
KSD20P73RA984: Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di area trotoar sepanjang koridor Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS SUMBER DAYA AIR, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DINAS BINA MARGA, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	dilaksanakannya Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di area trotoar sepanjang koridor Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	sterilnya area kerja pembangunan trotoar dari bangunan ilegal di area trotoar sepanjang koridor Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	TA20-B03: surat permohonan pembongkaran disampaikan oleh DBM ke Walikota Jakarta Selatan (B08-minggu 1). TA20-B06: bebasnya area ruang milik jalan yang akan digunakan untuk penataan trotoar dan bangunan pelengkap jalan (B08).	Menunggu Persetujuan
KSD20P73RA1000: Penagihan kewajiban Fasos-Fasum untuk lahan dan/atau konstruksi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terlaksananya proses penagihan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	Dapat dimanfaatkan lahan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	TA20-B06: (B04) tertandatanganinya surat persetujuan pemanfaatan lahan kewajiban fasos fasum dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi) dan disampaikan ke SKPD terkait. B05: termanfaatkannya area kewajiban fasos fasum para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	
KSD20P73RA1001: Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS SUMBER DAYA AIR,DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN,DINAS BINA MARGA,DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN,SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	dilaksanakannya Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di ruang milik jalan di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	sterilnya area kerja pembangunan trotoar dari bangunan ilegal di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 4 (55 lokasi).	TA20-B03: B02 : surat permohonan pembongkaran disampaikan oleh DBM ke Walikota Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Timur (B08-minggu 1). TA20-B06: B05 : bebasnya area ruang milik jalan yang akan digunakan untuk penataan trotoar dan bangunan pelengkap jalan (B08).	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
<p>KSD20P73RA1002: Penagihan kewajiban Fasos-Fasum untuk lahan dan/atau konstruksi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN</p>	<p>DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA</p>	<p>Terlaksananya proses penagihan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>Dapat dimanfaatkannya lahan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>TA20-B06: B04 : tertandatanganinya surat persetujuan pemanfaatan lahan kewajiban fasos fasum dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi) disampaikan ke SKPD terkait. B05: termanfaatkannya area kewajiban fasos fasum para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>Menunggu Persetujuan</p>
<p>KSD20P73RA1003: Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di lokasi rencana pembangunan trotoar di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN</p>	<p>DINAS SUMBER DAYA AIR, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DINAS BINA MARGA, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PENANAMAN MODAL</p>	<p>dilaksanakannya Pengoordinasian rencana penertiban bangunan ilegal yang berada di ruang milik jalan di lokasi rencana pembangunan trotoar di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi)</p>	<p>sterilnya area kerja pembangunan trotoar dari bangunan ilegal di lokasi rencana pembangunan trotoar di area trotoar sepanjang koridor complete street paket 3 reguler (13 lokasi).</p>	<p>TA20-B03: B02 : surat permohonan pembongkaran disampaikan oleh DBM ke Walikota Jakarta Pusat, Barat, Selatan dan Timur (B08-minggu 1).</p>	<p>Menunggu Persetujuan</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
		DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
					TA20-B06: B05 : bebasnya area ruang milik jalan yang akan digunakan untuk penataan trotoar dan bangunan pelengkap jalan (B08).	
KSD20P73RA1004: Penagihan kewajiban Fasos-Fasum untuk lahan dan/atau konstruksi di Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Terlaksananya proses penagihan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	Dapat dimanfaatkannya lahan dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya.	TA20-B03: B03 : tertandatanganinya surat persetujuan pemanfaatan lahan kewajiban fasos fasum dari para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca dan sekitarnya. dan disampaikan ke SKPD terkait. TA20-B06: B04 : termanfaatkannya area kewajiban fasos fasum para pemegang SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto - Jl. MT. Haryono dan sekitarnya; Jl. HR. Rasuna Said dan sekitarnya; & Jl. Casablanca	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					dan sekitarnya.	
KSD20P20 Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu						
KSD20P20RA986: Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran dan Branding PKT di Kelurahan	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	BIRO PEREKONOMIAN, DINAS SOSIAL, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	Sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di kelurahan	Terlaksananya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan	TA20-B03: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan minimal sekali. 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT. 3. Fasilitasi komputer di kelurahan untuk pendaftaran PKT dari kelompok masyarakat BDT dengan didampingi oleh pendamping 7 SKPD PKT TA20-B06: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan minimal sekali. 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT. 3. Fasilitasi komputer di kelurahan untuk pendaftaran PKT dari kelompok masyarakat BDT dengan didampingi oleh pendamping 7 SKPD PKT. 4. 30% Branding PKT (sticker) digunakan rumah binaan (Walikota dan Bupati) a. Jakarta Pusat ...lembar b.	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Jakarta Utara ...lembar c. Jakarta Barat ...lembar d. Jakarta Selatan ...lembar e. Jakarta Timur ...lembar f. Kepulauan Seribu ...lembar</p> <p>TA20-B09: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan minimal sekali. 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT 3. Fasilitasi komputer di kelurahan untuk pendaftaran PKT dari kelompok masyarakat BDT dengan didampingi oleh pendamping 7 SKPD PKT 4. 60% Branding PKT (sticker) digunakan rumah binaan (Walikota dan Bupati) a. Jakarta Pusat ...lembar b. Jakarta Utara ...lembar c. Jakarta Barat ...lembar d. Jakarta Selatan ...lembar e. Jakarta Timur ...lembar f. Kepulauan Seribu ...lembar</p> <p>TA20-B12: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan minimal sekali. 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT 3. Fasilitasi</p>	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					komputer di kelurahan untuk pendaftaran PKT dari kelompok masyarakat BDT dengan didampingi oleh pendamping 7 SKPD PKT4. 100% Branding PKT (sticker) digunakan rumah binaan (Walikota dan Bupati) a. Jakarta Pusat ...lembar b. Jakarta Utara ...lembar c. Jakarta Barat ...lembar d. Jakarta Selatan ...lembar e. Jakarta Timur ...lembar f. Kepulauan Seribu ...lembar	
KSD20P20RA1012: Penggunaan Brand PKT (Jakpreneur)	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	Tersosialisasinya brand PKT yang baru pada setiap produk dan rumah binaan PKT	1. SOP penggunaan branding PKT2. Penggunaan brand PKT pada produk dan tempat usaha PKT3. Laporan branding PKT pada acara pemasaran binaan PKT4. Materi promosi dan tagline PKT	TA20-B03: 1. Tersusunnya SOP penggunaan branding dan communication guideline PKT untuk setiap binaan PKT (DKUKMP dan Diskominfotik) (25 Februari)(standarisasi akan dibahas lebih lanjut oleh 7 SKPD PKT, Biro Perekonomian, dan Diskominfotik)2. Laporan sosialisasi Branding PKT (Jakpreneur) (25 Maret 2020)3. Terciptanya materi promosi dan tagline PKT (Diskominfotik) (25 Februari) TA20-B06: 1. Laporan branding PKT digunakan oleh 25% peserta binaan PKT 2018-2019 (P4)	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan peserta binaan PKT terdaftar 2020 dari masing-masing SKPD pada produk, sarana usaha dan rumah binaan dalam setiap acara pemasaran binaan PKT (7 SKPD PKT) (25 Juni 2020)</p> <p>TA20-B09: 1. Laporan branding PKT digunakan oleh 60% peserta binaan PKT 2018-2019 (P4) dan peserta binaan PKT terdaftar 2020 dari masing-masing SKPD pada produk, sarana usaha dan rumah binaan dalam setiap acara pemasaran binaan PKT (7 SKPD PKT) (25 September 2020)</p> <p>TA20-B12: 1. Laporan branding PKT digunakan oleh 100% peserta binaan PKT 2018-2019 (P4) dan peserta binaan PKT terdaftar 2020 dari masing-masing SKPD pada produk, sarana usaha dan rumah binaan dalam setiap acara pemasaran binaan PKT (7 SKPD PKT) (25 Desember 2020)</p>	
KSD20P20RA1013: Pengoperasian Kios di trotoar	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DINAS KESEHATAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS SUMBER DAYA AIR, DINAS PERHUBU	Beroperasinya kios di trotoar	1. Terinventarisasinya lokasi trotoar yang berpotensi ditempatkan kios. 2. Beroperasinya kios di trotoar	TA20-B03: 1. Laporan Inventarisasi trotoar di seluruh DKI Jakarta yang bisa dibangun kios (Dinas Bina Marga) (25	Menunggu Persetujuan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS VERIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
		NGAN,SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Februari)2. Beroperasinya 6 kios sudirman thamrin (Perumda Pasar Jaya) (25 Maret 2020) TA20-B06: 1. Laporan evaluasi pengoperasian 6 kios sudirman thamrin (Perumda Pasar Jaya) (25 Juni 2020)2. Beroperasinya 6 kios sudirman thamrin (Perumda Pasar Jaya) (25 Juni 2020)3. Laporan konsep lokasi kios di trotoar pada 5 wilayah (Dinas DKUKMP) (25 Mei) (lokasi baru)4. Penetapan lokasi kios di trotoar pada 5 wilayah (5 Walikota Administratif) (25 Juni 2020) TA20-B09: Beroperasinya kios di 2 lokasi trotoar (1 lokasi 1 wilayah) (Dinas DKUKMP) (25 September 2020) TA20-B12: Beroperasinya kios di 5 lokasi trotoar (1 lokasi 1 wilayah) (Dinas DKUKMP) (25 Desember 2020)	